



PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, STRUKTUR DESENTRALISASI, AKUNTABILITAS PUBLIK DAN PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Dinas Se-Kabupaten Wonogiri)

Anim Rahmayati^{1*}

Nur Asiyah Jamil²

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

*Email : anim.uci@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of budgeting participation, clarity of budget targets, decentralization structure, public accountability and functional supervision of managerial performance in Dinas Dinas in Wonogiri District.

The research method used in this study is quantitative research using primary data. Primary data was obtained by distributing questionnaires to respondents, namely head of department, head of finance, and head of field at the agencies in Wonogiri Regency, amounting to 87 respondents. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis.

The results showed that budgetary participation, clarity of budget targets, decentralized structure and public accountability had an effect on managerial performance in Dinas-Dinas in Wonogiri district. While functional supervision has no effect on managerial performance in Dinas-Dinas in Wonogiri District.

INFO ARTIKEL

Diterima: 28 Desember 2018

Direview: 14 Maret 2019

Disetujui: 26 Juni 2019

Terbit: 27 Desember 2019

Keywords:

managerial performance, budgeting participation, clarity of budget goals, decentralized structure, public accountability, functional supervision.

PENDAHULUAN

Pandangan masyarakat umumnya membentuk suatu pengertian tertentu dalam dinamika perkembangan kehidupan masyarakat, bahkan dapat mengembangkan prinsip atau pengertian tertentu menjadi lebih luas atau lebih rinci. Terjadinya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pemerintahan yang lebih baik, mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Berhasil atau tidaknya kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik (Laksana dan Handayani, 2014).

Adapun yang dimaksud dengan kinerja manajerial adalah suatu kinerja individu yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan manajerial seperti proses perencanaan, pengawasan, koordinasi, evaluasi, perwakilan dan sebagainya Mahoney *et.al* (1963) dalam Nugraha (2015). Efisiensi dan efektifitas merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur prestasi kerja manajemen (Handoko, 2002).

Proses penyusunan anggaran perlu diperhatikan agar dapat mencapai keberhasilan dalam organisasi. Agar alokasi anggaran dapat sesuai dengan sasaran maka diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pegawai dan aparatur organisasi (Ernawilis, 2015). Faktor yang mampu meningkatkan kinerja manajerial, salah satunya adalah partisipasi penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran dalam meningkatkan kinerja pemerintah memberi kesempatan kepada bawahan untuk ikut berpartisipasi mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Dalam hal ini untuk mendapatkan target yang sudah ditentukan bersama, pelaksanaannya harus sungguh-sungguh dan transparan (Anwar dan Sumiati, 2014).

Proses penganggaran daerah diatur dalam Kepmendagri Nomor 13 tahun 2006. Regulasi tersebut menjelaskan tentang pedoman dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (Anwar dan Sumiati, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhalimah (2013) bahwa penyusunan anggaran sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Sumarno (2005) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.

Kinerja manajerial pemerintah juga dapat dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran. Menurut Kenis (1979) kejelasan sasaran anggaran merupakan seberapa jauh tujuan dari anggaran tersebut ditetapkan secara jelas sehingga dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan anggaran tersebut.

Kenis (1979) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu dari karakteristik penganggaran. Sasaran anggaran pada pemerintah daerah terdapat dalam Rencana Strategik Daerah dan Program Pembangunan Daerah. Adanya kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan penyusunan target-target anggaran (Suhartono dan Solichin, 2006). Sistem penganggaran akan bermanfaat untuk standar evaluasi kinerja jika sasaran anggaran disusun dengan jelas.

Struktur desentralisasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial. Menurut Hill (1998) dalam Tarjono dan Nugraha (2015) desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang yang meluas dalam bentuk pengambilan keputusan pada manajer dibawahnya.

Siegel dan Marconi (1989) dalam Tarjono dan Nugraha (2015) menyatakan bahwa adanya sistem desentralisasi memberikan beberapa manfaat diantaranya yaitu waktu pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis akan lebih banyak, respon organisasi terhadap suatu masalah akan lebih cepat dan efektif, secara tidak langsung akan memotivasi organisasi.

Penelitian Asrini (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas publik mampu memengaruhi kinerja manajerial. Mahsun (2006) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang dilakukan, dengan menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak meminta pertanggungjawaban.

Selanjutnya pengawasan fungsional juga mempengaruhi kinerja manajerial. Dimana pengawasan ini dilakukan oleh internal pemerintah daerah maupun eksternal pemerintah daerah (Baswir, 2000). Pengawasan fungsional sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah agar meminimalkan penyimpangan dari tujuan yang sudah direncanakan dan telah digariskan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (Dewi dkk, 2015).

Dewi dkk, (2015) menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan menurut Laksana dan Handayani (2014) berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas publik di Kabupaten Batang.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kinerja manajerial antara lain penelitian Darman dan Baharuddin (2015) dan Ernawilis (2015) menyatakan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi, dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Penelitian Kewo (2014) menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Penelitian Hidayat (2015) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Penelitian Sari, Sinarwati, dan Sujana (2014) menyatakan bahwa kinerja manajerial secara signifikan dipengaruhi oleh akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran. Selanjutnya, penelitian Amanta, Putra, dan Werastuti (2015) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Penelitian ini dilakukan karena adanya *riset gap* pada penelitian terdahulu. Penelitian Ernis, Sulasrso dan Wardayati (2017); Asrini (2017); Tarjono dan Nugraha (2015); Darman dan Baharuddin (2015); Kewo (2014) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sementara hasil penelitian Apriansyah, Zirman, dan Rusli (2014); Nengsy, Sari, dan Agusti (2013) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Penelitian Darman dan Baharuddin (2015); Ernawilis (2015); Kewo (2014) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Ketiga penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Wahyuni, Rasuli, dan Diyanto (2014) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Penelitian Darmawan (2016); Amanta, Putra, dan Werastuti (2015); Hazmi, Imran, Zuarni, Irawan, dan Safrizal, (2012) menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Ketiga penelitian berlawanan dengan penelitian Wahyuni, Rasuli, dan Diyanto (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Darman dan Baharuddin (2015). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel pengawasan fungsional. Penelitian ini dilakukan karena adanya fenomena yang terjadi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wonogiri menyatakan bahwa pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Wonogiri diukur dengan pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis, yang mengacu pada indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Terjadi penurunan peringkat kinerja Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara nasional. Pada tahun 2010 Pemkab Wonogiri menduduki peringkat 22 se-Indonesia. Namun kinerja Pemkab Wonogiri menurun ke peringkat 56 pada tahun 2011. Peringkat ini menurun drastis menjadi 146 pada tahun 2012. Pada tahun 2014 Pemkab Wonogiri menduduki peringkat 132. Sampai tahun 2016 Pemkab Wonogiri belum bisa melakukan pencapaian seperti pada tahun 2010. Hal ini diungkapkan oleh Sekda Wonogiri Suharno (www.iklansuamamerdeka.com).

Tidak hanya penurunan peringkat kerja secara nasional, pencapaian kinerja Pemkab Wonogiri rata-rata juga mengalami penurunan dari tahun 2013-2016. Pada tahun 2013 yaitu 2,7132 atau 271,32% (KEPMENDAGRI No.120-4761 Tahun 2014). Sedangkan pada tahun 2014 adalah 2,6426 atau 264,26 % (KEPMENDAGRI No.800-35 Tahun 2016). Pada tahun 2015 hasil pencapaian rata-rata kinerja adalah 245,74%, sedangkan pada tahun 2016 hasil pencapaian 225,68% (LKjP 2015-2016).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi,

Akuntabilitas Publik dan Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Manajerial (Studi pada Kantor Dinas Se-Kabupaten Wonogiri)”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri?
3. Apakah struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri?
4. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri?
5. Apakah pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri?

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kinerja Pemerintah

Menurut Hidayat (2015) kinerja manajerial merupakan seberapa besar kemampuan dan prestasi manajer dalam menjalankan organisasi, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang mengarah kepada pelayanan publik. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan dalam kegiatan manajerial seperti perencanaan, investigasi atau pemeriksaan, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, perwakilan, tingkat kinerja secara keseluruhan (Mahoney 1963 dalam Wahyuni dan Rosmida, 2017).

Mahoney dkk (1963) dalam Arum (2016) menyatakan bahwa kinerja manajerial dapat diukur dengan sembilan indikator yaitu

- a. Perencanaan merupakan proses penentuan kebijakan serta kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa depan dengan mempertimbangkan situasi kondisi saat ini dan masa yang akan datang. Proses perencanaan bertujuan untuk menentukan pedoman dan prosedur pelaksanaan tujuan, kebijakan, penganggaran, serta kegiatan, sehingga mampu terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi untuk melakukan pencatatan serta pelaporan sehingga mempermudah pengukuran serta analisis kegiatan yang telah dilakukan.
- c. Koordinasi merupakan penyelarasan tindakan yang melibatkan kegiatan pertukaran informasi sehingga mampu berhubungan serta menyesuaikan program yang akan dilaksanakan.
- d. Evaluasi merupakan penilaian terhadap rencana yang telah dibuat atas kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat diambil keputusan yang diperlukan untuk organisasi.
- e. Pengawasan merupakan penilaian, pengamatan terhadap kinerja yang dilakukan atau kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya.
- f. Pemilihan staff merupakan semua proses yang berkaitan dengan penempatan serta penentuan bawahan dalam pekerjaannya di suatu unit kerja.
- g. Negoisasi merupakan usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam transaksi dan kontrak dengan organisasi atau perusahaan lain.
- h. Perwakilan yaitu penyampaian visi misi, tujuan, kegiatan organisasi melalui pertemuan-pertemuan dengan organisasi dan perusahaan lain.
- i. Penilaian terhadap tingkat kinerja secara keseluruhan.

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi dalam penyusunan anggaran memberi kesempatan kepada bawahan untuk ikut partisipasi mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Dalam hal ini untuk mendapatkan target yang sudah ditentukan bersama, pelaksana harus sungguh-sungguh dan jeli dalam meningkatkan komitmennya. Anggaran pada sektor pemerintah setelah disusun harus dipublikasikan kepada rakyat agar lebih transparan, dimana anggaran dari sektor publik didapatkan dari pajak, retribusi, laba pemerintah milik daerah maupun negara, pinjaman utang luar negeri dan obligasi (Anwar dan Sumiati, 2014).

Dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran, maka kinerja pegawai akan meningkat. hal ini di sebabkan ada tiga hal yaitu *pertama*, partisipasi penyusunan anggaran akan menyebabkan atasan dan bawahan akan berkomitmen dalam organisasi karena adanya tanggung jawab yang timbul dimana anggaran merupakan hasil diskusi kedua belah pihak. *kedua*, partisipasi penyusunan anggaran terjadi persamaan karena atasan melibatkan bawahan sebagai penyusun anggaran. *ketiga*, partisipasi penyusunan anggaran membuat atasan akan mengetahui informasi dari bawahan terkait pada pekerjaan (Wicaksono, 2016).

Brownell (1982) mendefinisikan partisipasi anggaran sebagai proses dalam dimana individu, yang kinerjanya akan dievaluasi, dan dinilai, berdasarkan pencapaian target anggaran mereka, keterlibatan, dan pengaruh pada penentuan target tersebut. Hal ini didukung oleh Milani (1975) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran adalah sejauh mana pengaruh, keterlibatan, dan kontribusi individu (bawahan manajer) dalam proses penganggaran.

Schiff dan Lewin (1970) dalam Darman dan Baharuddin (2015) menerangkan terdapat tiga aspek fungsional sistem partisipasi dalam anggaran yaitu (1) meningkatkan moral pelaksana, semangat, motivasi, dan inisiatif; (2) merangsang kerja sama dalam semua divisi organisasi; (3) mendorong bawahan untuk memahami tujuan yang ingin dicapai organisasi dan agar lebih responsif terhadap masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan anggaran.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana perusahaan yang disusun sistematis serta menggambarkan kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk satuan moneter (Lubis, 2010). Anggaran harus disusun dengan jelas sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mampu memahami anggaran tersebut untuk mencapai sasaran atau target dari perusahaan.

Kejelasan sasaran anggaran menjelaskan seberapa tinggi tingkat kejelasan sasaran atau tujuan anggaran serta tingkat pemahaman pihak-pihak yang berkepentingan dalam menerjemahkan maksud dari anggaran tersebut (Kenis, 1979). Kejelasan sasaran anggaran merupakan hal yang sangat penting. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan organisasi dalam mengukur keberhasilan setiap program untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Pengukuran yang tepat baik itu dalam bentuk evaluasi ataupun yang lainnya, akan membuat organisasi mengetahui seberapa baik kinerja yang telah dilakukan (Herawaty, 2011).

Kenis (1979) menyatakan bahwa kejelasan tujuan anggaran mengacu pada tingkat yang tujuan anggarannya dinyatakan spesifik, jelas, dan dipahami oleh mereka yang bertanggung jawab. Sasaran yang disusun secara spesifik dan jelas akan mencegah munculnya berbagai macam interpretasi pelaksana anggaran. Anggaran yang jelas dan spesifik akan memudahkan pelaksana anggaran dalam memahami maksud dan tujuan dari anggaran tersebut.

Anthony dan Govindarajan (2005) menyatakan bahwa adanya kejelasan sasaran anggaran mampu mengatur tindakan karyawan. Hal ini disebabkan karena anggaran merupakan alat yang penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif.

Struktur Desentralisasi

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai sistem di Indonesia (Undang-Undang No.23 Tahun 2014)

Koswara (1996) dalam Hidayat (2015) menyebutkan bahwa makna dari adanya desentralisasi adalah adanya melalui proses pelimpahan urusan-urusan pemerintahan yang pada awalnya wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada pemerintah daerah dan menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Nugroho (2000) dalam Darman dan Baharrudin (2015) menyebutkan bahwa terdapat dua manfaat desentralisasi. Yaitu mendorong partisipasi masyarakat, inisiatif, dan kreativitas, seperti sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di segala bidang; serta memperbaiki alokasi sumber daya produktif.

Struktur desentralisasi dalam organisasi umumnya ditujukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi. Struktur organisasi yang terdesentralisasi terjadi apabila sebagian otorisasi didelegasikan ke level atau tingkat hirarki yang lebih rendah dalam organisasi (Hidayat, 2014).

Desentralisasi dalam konteks organisasi memiliki perbedaan dengan desentralisasi dalam pemerintahan secara luas. Supriyatno (2010) dalam Darman dan Baharrudin (2015) mendefinisikan desentralisasi sebagai administratif organisasi organisasi dimana manajemen yang lebih tinggi mendelegasikan penentuan pengambilan keputusan ke manajemen di bawahnya. Riyadi (1998) dalam Darman dan Baharrudin (2015) lebih lanjut menjelaskan bahwa pendelegasian ini juga disertai dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab.

Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2009) mendefinisikan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah prinsip pertanggungjawaban mulai dari proses penganggaran sampai realisasi kegiatan yang harus dilaporkan kepada publik atau pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas publik merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka korupsi terutama pada organisasi pemerintahan.

Ellwood (1993) menyatakan bahwa terdapat empat dimensi yang harus dipenuhi organisasi sektor publik dalam hal pertanggungjawaban yaitu akuntabilitas untuk kejujuran dan legalitas, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan.

- a. Akuntabilitas kejujuran dan legalitas berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan jabatan serta jaminan bahwa telah ada kepatuhan pada hukum dan kewajiban lainnya persyaratan dalam penggunaan sumber daya organisasi.
- b. Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan sudah memadai atau belum. Seperti kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- c. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah program yang disusun organisasi telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan atau tidak, dengan sudah mempertimbangkan program alternatif yang mungkin lebih efektif dan efisien.
- d. Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan apa kebijakan pemerintah dan standar aturan dalam organisasi yang disusun sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pengawasan Fungsional

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. UU tersebut

memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah (Laksana dan Handayani: 2014).

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim dalam Wiguna dkk: 2015).

Menurut Silalai, dkk (2014) kegiatan pengawasan mutlak dilakukan agar dapat terlaksana kegiatan instansidalam mencapai tujuan yang diharapkan. Pengawasan yang efektif akan memberikan suatu jaminan yang mengikat seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya penuh tanggung jawab. Aris (2001) dalam Silalai, dkk (2014) mengatakan pengawasan/supervisi merupakan tindakan mengawasi atau mengarahkan penyelesaian pekerjaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah objek penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angkadan melalui analisis data dengan menggunakan prosedur statistik (Indriantoro and Supomo, 2011).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala dinas, kepala bagian keuangan, dan kepala bidang pada dinas-dinas di Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 87 orang. Seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sebagai sampel.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa data dari kuesioner yang disebarikan kepada responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian ini.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Adapun urutan pengujian dimulai dari Uji instrumen penelitian dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Setelah itu dilakukan pengujian ketepatan model dan uji hipotesis. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + b4.X4 + b5.X5 + e$$

Keterangan :

Y	= Variabel Kinerja manajerial
X1	= Variabel Partisipasi penyusunan anggaran
X2	= Variabel Kejelasan Sasaran anggaran
X3	= Variabel Struktur Desentralisasi
X4	= Variabel Akuntabilitas Publik
X5	= Variabel Pengawasan fungsional
a	= Nilai konstanta
b1 s/d b5	= Nilai koefisien regresi
e	= standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah kuesioner yang disebar kepada responden berjumlah 87. Akan tetapi, kuesioner yang kembali dan dapat diolah adalah sejumlah 75 kuesioner. Berdasarkan hasil pengujian instrumen penelitian diperoleh hasil bahwa seluruh instrumen pernyataan dalam penelitian ini valid dan reliabel. Begitu juga dengan hasil uji asumsi klasik, diperoleh hasil bahwa residual data terdistribusi normal serta tidak terjadi multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

Hasil Uji Ketepatan Model

1. Hasil Uji F

Uji F merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel independen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan tingkat signifikansi α yaitu 5% (Ghazali, 2016). Berikut ini merupakan hasil uji F dengan SPSS :

Tabel 1
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1859,263	5	371,853	24,392	,000 ^b
	Residual	1051,883	69	15,245		
	Total	2911,147	74			

a. Dependent Variable: km

b. Predictors: (Constant), pf, ap, sd, ppa, ksa

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas yang diperoleh F_{hitung} sebesar 24,392 dan sig. 0,000. $p\text{-value} < \alpha$ ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sudah layak atau fit.

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen (Ghazali, 2016). Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 2
Ringkasan Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,799 ^a	0,639	0,612	3,90444

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai adjusted $R^2 = 0,612$. Hal ini berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 61,2%, sisanya sebesar 38,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi hubungan dua variabel melalui koefisien regresinya (Misbahuddin, 2014). Berikut ini merupakan ringkasan hasil analisis regresi berganda:

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-8,508	6,174		-1,378	,173
1 x1	,659	,114	,497	5,779	,000
x2	,477	,225	,190	2,125	,037
x3	,301	,124	,194	2,427	,018
x4	,183	,091	,183	2,009	,048
x5	,064	,262	,018	,244	,808

a. Dependent Variable: y

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas, maka didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -8,508 + 0,659X_1 + 0,477X_2 + 0,301X_3 + 0,183X_4 + 0,064X_5$$

Interpretasinya :

1. Nilai konstanta bernilai -8,508. Nilai tersebut menyatakan bahwa apabila variabel independen (partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran struktur desentralisasi, akuntabilitas publik dan pengawasan fungsional) dianggap konstan, maka rata-rata pencapaian kinerja manajerial dinas se-Kabupaten Wonogiri menurun sebesar 8,508. Nilai konstanta yang negatif tidak menjadi persoalan selama nilai slope tidak nol.
2. Koefisien regresi variabel partisipasi penyusunan anggaran bernilai positif sebesar 0,659. Hal ini menyatakan bahwa apabila partisipasi penyusunan anggaran dinaikkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan pencapaian kinerja manajerial dinas se-Kabupaten Wonogiri sebesar 0,659.
3. Koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran bernilai positif sebesar 0,477. Hal ini menyatakan bahwa apabila kejelasan sasaran anggaran dinaikkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan pencapaian kinerja manajerial dinas se-Kabupaten Wonogiri sebesar 0,477.
4. Koefisien regresi variabel struktur desentralisasi bernilai positif sebesar 0,301. Hal ini menyatakan bahwa apabila struktur desentralisasi dinaikkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan pencapaian kinerja manajerial dinas se-Kabupaten Wonogiri sebesar 0,301.
5. Koefisien regresi variabel akuntabilitas publik bernilai positif sebesar 0,183. Hal ini menyatakan bahwa apabila akuntabilitas publik dinaikkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan pencapaian kinerja manajerial dinas se-Kabupaten Wonogiri sebesar 0,183.
6. Koefisien regresi variabel pengawasan fungsional bernilai positif sebesar 0,064. Hal ini menyatakan bahwa apabila pengawasan fungsional dinaikkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan pencapaian kinerja manajerial dinas se-Kabupaten Wonogiri sebesar 0,064.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk pengambilan keputusan atau menguji hipotesis yang telah disusun dengan cara melihat nilai T_{hitung} dan tingkat signifikansinya (Ghazali, 2016). Berikut ini merupakan hasil uji hipotesis :

Tabel 4
Hasil Uji Hipotesis

Variabel Independen	T_{hitung}	Sig	Kesimpulan
Partisipasi Penyusunan Anggaran	5,779	0,000	X1 berpengaruh terhadap Y
Kejelasan Sasaran Anggaran	2,125	0,037	X2 berpengaruh terhadap Y
Struktur Desentralisasi	2,427	0,018	X3 berpengaruh terhadap Y
Akuntabilitas Publik	2,009	0,048	X4 berpengaruh terhadap Y
Pengawasan Fungsional	0,224	0,808	X5 tidak berpengaruh terhadap Y

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa :

1. Variabel partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial di Dinas se-Kabupaten Wonogiri. Artinya bahwa apabila terdapat partisipasi penyusunan anggaran yang baik maka kinerja manajerial juga baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Asrini (2017); Sari (2016); Arum (2016); Amanta, Putra, dan Werastuti, (2015); Darman dan Baharuddin (2015); Ernawilis (2015); Tarjono dan Nugraha (2015); Kewo (2014); Primadana, Yuniarta, dan Adiputra (2014); Sari, Sinarwati, dan Sujana (2014); Amertadewi dan Dwirandra (2013); Mah'd, Al-Khadash, Idris, dan Ramadan (2013) menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Mekanisme penyusunan anggaran partisipatif pada dinas-dinas di Kabupaten Wonogiri baik itu manajer atas, menengah maupun bawah sudah dilakukan dengan baik. Adanya kerjasama semua pihak dalam proses penyusunan anggaran maka akan mencapai keberhasilan proses penganggaran. Keberhasilan dalam proses penganggaran akan berdampak pada usaha untuk melaksanakan anggaran yang telah disusun dan mendorong pada peningkatan kinerja manajerial.

2. Variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial di Dinas se-Kabupaten Wonogiri. Hal ini berarti bahwa apabila terdapat kejelasan sasaran anggaran yang baik maka kinerja manajerial juga baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Asrini (2017); Efrizar (2017); Arum (2016); Darmawan (2016); Darman dan Baharuddin (2015); Amanta, Putra, dan Werastuti (2015); Ernawilis (2015); Hidayat (2015); Nugraha (2015); Kewo (2014); Primadana, Yuniarta, dan Adiputra (2014); Sari, Sinarwati, dan Sujana (2014); Hazmi, Imran, Zuarni, Irawan, dan Safrizal (2012) yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Dinas-dinas di Kabupaten Wonogiri sudah menyusun anggaran secara spesifik dan jelas, sehingga memudahkan para pelaksana anggaran dalam menerjemahkan anggaran dan pengukuran pencapaian tujuan organisasi sehingga pelaksanaan anggaran akan sesuai dengan tujuan disusunnya anggaran tersebut. Hal ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi organisasi sehingga akan berimplikasi mendorong perbaikan kinerja yang semakin baik.

3. variabel struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Dinas se-Kabupaten Wonogiri. Apabila terdapat struktur desentralisasi yang baik maka kinerja manajerial juga baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Darmawan (2016); Sari (2016); Arum (2016); Darman dan Baharuddin (2015); Ernawilis (2015); Hidayat (2015); Tarjono dan Nugraha (2015); Primadana, Yuniarta, dan Adiputra (2014); Sari, Sinarwati, dan Sujana (2014); Wahyuni, Rasuli, dan Diyanto (2014) menunjukkan adanya pengaruh antara struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial.

Dinas-dinas di Kabupaten Wonogiri sudah melakukan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab yang lebih luas kepada manajer bawah dari manajer atas. Pelimpahan wewenang ini akan memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada manajer bawah sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kinerjanya.

4. Variabel akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial di Dinas se-Kabupaten Wonogiri. Apabila terdapat akuntabilitas publik yang baik maka kinerja manajerial juga baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan D Efrizar (2017); Asrini (2017); Darmawan (2016); Sari (2016); Darman dan Baharuddin (2015); Ernawilis (2015); Amanta, Putra, dan Werastuti, (2015); Hazmi, Imran, Zuarni, Irawan, dan Safrizal, (2012) yang menunjukkan adanya pengaruh antara akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial.

Dinas-dinas di Wonogiri sudah menyusun laporan pertanggungjawaban. Masyarakat di Wonogiri dapat mengetahui dan melakukan penilaian terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah tersebut, sehingga organisasi akan temotivasi dan terdorong untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Variabel pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Dinas se-Kabupaten Wonogiri. Hal ini berarti baik ada pengawasan maupun tidak ada pengawasan, pegawai pada dinas-dinas di Kabupaten Wonogiri tetap menjalankan tugasnya dengan baik.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna, dkk (2015) dan Dewi dkk, (2015) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, Kejelasan sasaran anggaran, Struktur desentralisasi, Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Dinas se-Kabupaten Wonogiri. Sedangkan Pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Dinas se-Kabupaten Wonogiri.

REFERENSI

- Almasia, H., Palizdarb, M. R., and Parsianc, H. 2015. Budgetary participation and managerial performance: The impact of information and environmental volatility. *Management Science Letters* 5, 843–854.
- Amertadewi, Tjokorda I.M dan Dwirandra, A.A.N.B. 2013. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan gaya kepemimpinan dan *locus of control* sebagai variabel moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.4.3. 550-566, ISSN: 2302-8556.*
- Amanta, K. B., Putra, M. P., dan Werastuti, D. N. 2015. Pengaruh komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, ketepatan skedul penyusunan, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi

penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* .

- Anthony, R. N., dan Vijay G. 2005. *Sistem pengendalian manajemen buku 2* (Kurniawan Tjakrawala, Penerjemah). Jakarta: Salemba Empat.
- Apriansyah, G., Zirman, dan Rusli. (2014). Pengaruh partisipasi anggaran, komitmen organisasi, kepuasan kerja, *job relevant information* dan budaya organisasi terhadap kinerja manajerial pada perhotelan di Provinsi Riau. *Jom Fekon Vol. 1 No.2* , 1-22.
- Arum, N. S. 2016. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD (studi pada SKPD pemerintah daerah kabupaten lima puluh kota). *Jom Fekon Vol.3 No.1* , 249-263.
- Asrini. 2017. Pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Daerah Kota Palu . *e Jurnal Katalogis, Vol 5* , 52-58, ISSN: 2302-2019.
- Astuti, S. Puji. 2015. *Modul praktikum statistika*. Sukoharjo: FEBI IAIN Surakarta.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi sektor publik : suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Brownell, P. 1982. A field study examination of budgetary participation and locus of control. *The Accounting Review, Vol. 57, No. 4*, 766-777.
- Brownell, P. and McInnes. 1986. Budgetary participation, motivation, and managerial performance. *The Accounting Review, Vol. 61, No. 4*, 511-526.
- Bungin, B. 2011. *Metode penelitian kuantitatif: komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Darman, and Baharuddin, A. 2015. The effect of budgetary participation, budgetary goal clarity, decentralized structure, and public accountability on the performance of regional work units (SKPD), at Gowa District, Sulawesi Selatan. *Scientific Reseach Journal (SCIJR), Vol III, Issue X, October, 22-28, ISSN 2201-2796*.
- Darmawan, R. 2016. Pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Bengkalis. *JOM Fekon Vol. 3*, 792-806.
- Dwirandra, T. I. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Gaya Kepemimpinan dan *Locus of Control* sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.3*, 550-566.
- Efrizar, R. 2017. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, dan sistem pelaporan terhadap kinerja manajerial (studi empiris pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu). *Jom Fekon, Vol. 4*, 1726-1740.
- Ellwood, S. 1993. Parish and town councils: financial accountability and management. *Local Government Studies, Vol.19*. pp 368-386.
- Ernawilis. 2015. Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi Kabupaten Kuantan Singingi . *Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober* , hlm.1-14.
- Ernis, F., R. A. Sularso dan S. A. Wardayati. 2017. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi dan motivasi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Bisma Volume 11 Nomor 2*.

- Ghazali, I. 2016. *Analisis multivariat: dengan program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hansen, D. R., dan Mowen, M. M. 2007. *Akuntansi manajerial edisi 8*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Halim, A., dan Kusufi, S. 2012. *Akuntansi sektor publik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Handoko, T. H. 2002. *Manajemen edisi kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, M. 2006. *Manajemen sumber daya manusia edisi revisi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hazmi, Y., Imran, A., Zuarni, Irawan, Y., dan Safrizal, S. H. 2012. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintahan kota Lhokseumawe, studi empiris pada satuan kerja perangkat kota Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.13, 31-37, ISSN 1693-8852*.
- Herawaty, N. 2011. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol.13, No.2, 31-36, ISSN 0852-8349*.
- Hidayat, T. 2015. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi dan *locus of control* terhadap kinerja manajerial. *Akuntabilitas, 148 -161, P-ISSN: 1979-858X*.
- [Http://www.iklansuaramerdeka.com/kinerja-pemkab-kian-menurun/](http://www.iklansuaramerdeka.com/kinerja-pemkab-kian-menurun/). Diakses tanggal 9 April 2018. Pukul 16.31.
- [Http://www.wonogirikab.go.id/web/detail/7106/lagi,_pemkab_wonogiri_raih_predikat_wtp](http://www.wonogirikab.go.id/web/detail/7106/lagi,_pemkab_wonogiri_raih_predikat_wtp). Diakses pada tanggal 5 November 2017. Pukul 10.23.
- Kadir. 2015. *Statistik terapan: konsep, contoh dan analisis data dengan program SPSS/ lisrel dalam penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kenis, I. 1979. Effects of budgetary goal characteristics on managerial attitudes and performance. *The Accounting Review, Vol. 54, No. 4 ,707-721*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-4761 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2013. Diakses di <http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/DaftarSPM/KEPMENDAGRI%20EKPPD%20TERHADAP%20LPPD%20TAHUN%202013.pdf>. Diakses pada 9 April 2018. Pukul 16.31.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800-35 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2014. Diakses di <http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/DaftarSPM/Pemeringkatan%20Daerah.pdf>. Diakses 9 April 2018. Pukul 16.35.
- Kewo, C. L. 2014. The effect of participative budgeting, budget goal clarity and internal control implementation on managerial performance. *Research Journal of Finance and Accounting* , 2222-2847.
- Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pememerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015. Diakses di http://www.wonogirikab.go.id/upload/download/800b23953f98076e1455690f919bd18f_14-ppid-2016-LKjIP%20Kab.%20Wono_giri%202015.pdf. Diakses pada tanggal 5 November 2017. Pukul 11.00.
- Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pememerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016. Diakses di http://www.wonogirikab.go.id/upload/download/LKjIP_Kabupaten_Wonogiri_2016.pdf. Diakses 5 November 2017. Pukul 10.30.

- Latan, H., dan Temalagi, S. 2012. *Analisis multivariate teknik dan aplikasi menggunakan program IBM SPSS 20.0*. Bandung : Alfabeta.
- Lina, D. 2014. Analisis pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dengan sistem reward sebagai variabel moderating. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol 14 No . 1 / Maret, 77-97*.
- Lubis, A. I. 2010. *Akuntansi keperilakuan edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mah'd, O., Al-Khadash, H., Idris, M., and Ramadan, A. 2013. The impact of budgetary participation on managerial performance: evidence from jordanian university executives. *Journal of Applied Finance & Banking, Vol. 3, No. 3, 133-156, ISSN: 1792-6599*.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran kinerja sektor publik edisi pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miah, N. Z. and Mia, L. 1996 . Desentralisation and accounting control of government organization: a New Zealand empirical study. *Financial Accountabilty and Management. Vol. 12, No. 3, 173-189*.
- Milani, K. 1975. The relationship of participation in budget-setting to industrial supervisor performance and attitudes: a field study. *The Accounting Review, Vol. 50, No.2,274-284*.
- Misbahuddin, I.H. 2014. *Analisis data penelitian dengan statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustika, A., & Utomo, H. 2013. Pengaruh budaya organisasi, terhadap kinerja karyawan dengan variabel kepuasan kerja sebagai variabel intervening (studi kasus pada koperasi simpan pinjam gradiska Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang tahun 2013) . *Among Makarti Vol.6 No.12, 87-111*.
- Nengsy, H., Sari, R. N., dan Agusti, R. 2013. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan job relevant information, kepuasan kerja dan motivasi sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 1, 1-17*.
- Nugraha, V. D. 2015. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hulu). *Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober , 1-15*.
- Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun. 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diakses di <http://peraturan.go.id/perpres/nomor-29-tahun-2014-11e44c4eebdb340ae5e313231373337-11e44c4eebdb340ae5e313231373337.html>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2018. Pukul 20.32.
- Primadana, G. H., Yuniarta, G. A., dan Adiputra, M. P. 2014. Pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi (studi empiris pada Pemerintah Kabupaten Badung). *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Volume 2, No.1*.
- Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri, 2017.
- Sari, D. P., Sinarwati, N. K., dan Sujana, E. 2014. Pengaruh akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerialsatuan kerja perangkat daerah. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.2 No.1*.

- Sari, E. J. 2016. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, desentralisasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah (studi pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). *Jom Fekon Vol. 3 No. 1 (Februari)*, 380-393.
- Sarjono, dan Julianita. 2013. *SPSS vs LISREL : Sebuah pengantar, aplikasi untuk riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suartana, I. W. 2010. *Akuntansi keperilakuan teori dan implementasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. 2015. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, E. dan Solichin, M. 2006. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran instansi pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, 1-20*.
- Sumarno, J. 2005. Pengaruh komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial (studi empiris pada kantor cabang perbankan Indonesia di Jakarta). *Jurnal Bisnis Strategi Vol. 14 No. 2, 197-210*.
- Sumodiningrat, G. 2010. *Ekonometrika Pengantar*. Yogyakarta: BPFE.
- Supriyono, R. 2001. *Akuntansi manajemen 3 proses pengendalian manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Tarjono, dan Nugraha, A. 2015. Pengaruh partisipasi anggaran dan desentralisasi organisasi terhadap kinerja manajerial dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi (studi analisis pada Pemerintah Kabupaten Pematang). *Media Ekonomi Dan Manajemen, Vol. 30 No. 1 Januari , 85-100, ISSN : 0854-1442*.
- Wahyuni, R., Rasuli, M., dan Diyanto, V. 2014. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (studi empiris pada SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru). *JOM FEKON Vol 1 No. 2*.
- Wulandari, N. K., dan Sujana, I. K. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kepuasan Kerja dan Kinerja Manajerial Di Pt. (Persero) Angkasa Pura I Ngurah Rai Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.1 , 54-73*.
- Wicaksono, Galih. 2016. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap k inerja manajerial pada sekolah menengah negeri di tegal. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Volume 6 (2). Halaman 199 – 212.